

TESIS

“BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”

Untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh gelar magister hukum
Pada program studi magister ilmu hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh : INDRA PRAMANA

NPM : 18310026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020

TESIS

“BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

INDRA PRAMANA

NPM: 18310026

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. SUHANDI, SH., M.Hum.

(KETUA)

1.

2. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.

3. Dr. UMI ENGGARSASI S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

3.

4. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

4.

TESIS

**“BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA”**

Diajukan Oleh :
INDRA PRAMANA
NPM : 18310026

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Surabaya, 20 Juli 2020

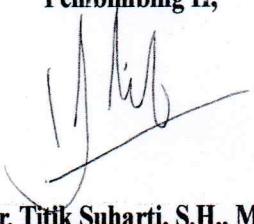
MENGESAHKAN,

Pembimbing I



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

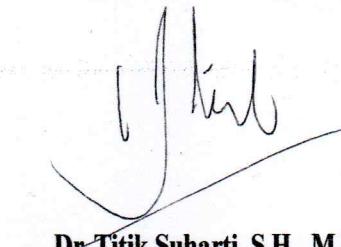
Pembimbing II,



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Pramana

NPM : 18310026

Alamat : Aspol Wage 2 D-25, Taman Sidoarjo

No.Telp : 082334725636

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan peradilan tinggi.

Surabaya, 20 Juli 2020

Yang Menyatakan



Indra Pramana
18310026

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya Tesis yang berjudul “BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum universitas Wijaya Kusuma surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan yang telah selama mengikuti perkuliahan.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta adikku yang telah memberi dorongan moral dan materil, serta doa yang tak pernah berhenti.
7. Orang yang paling special, Istri saya Sedy Kresnawati dan anak pertama saya Zhafran Al Farizi Pramana yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Semua rekan-rekan seangkatan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu mendukung dan membantu saya selama proses penggeraan tesis ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Hormat kami,

Indra Pramana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH	1
B. TUJUAN PENELITIAN	6
C. MANFAAT PENULISAN	7
D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	17
F. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.....	21
BAB II KEWENANGAN DAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	24
A. Kewenangan Penyidik Dalam Diskresi	24
B. Kewenangan Dan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	35

BAB III BATASAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA	65
A. Tugas Kepolisian Dalam Diskresi	65
B. Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	72
BAB IV PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	81
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana” bertujuan pertama mengetahui dan/atau lebih memahami mengenai konsep dan bentuk dari kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana didalamnya. Kedua untuk mengetahui, batas-batas diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum (*Law Enforcement*), khususnya terkait dengan penegakan hukum dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak harus selalu menyelesaiakannya melalui proses peradilan pidana, karena berdasarkan ketentuan yang ada didalam UU Sistem Peradilan Anak penyidik wajib terlebih dahulu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menerapkan diversi (*Vide* pasal 5 ayat (1), (3) dan pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak). Selain itu, penyidik ketika menangani perkara pidana anak berdasarkan penilaianya dapat mengambilkan tindakan lain dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Kedua : Batasan yang dimiliki penyidik dalam hal menggunakan diskresi yang dimilikinya sebenarnya secara implisit telah diberikan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU POLRI yakni didasarkan pada asas kepentingan umum yang merupakan bagian daripada asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat Diskresi merupakan bagian daripada kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, maka sudah sepatutnya dalam penggunaan diskresi tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, penyidik juga wajib untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

KATA KUNCI : Penyidik, Batasan Diskresi, Anak Pelaku Tindak Pidana

ABSTRACT

The study entitled "Limitation of Buffer Discretion in Case Handling as a Criminal Actor" first discusses and / or further discusses the concepts and forms of authority and discretion demanded by investigators, which are related to questionable assistance that is asked in connection with related needs. Second, to find out, the limits of discretion held by investigators in terms of carrying out law enforcement, specifically related to law enforcement in cases involving children as parties who commit criminal acts.

The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded first: Investigators when handling cases involving children as perpetrators of crime, do not have to always solve them through the criminal justice process, because based on the provisions contained in the Juvenile Justice System Act, investigators must first use alternative dispute resolution (Alternative Dispute Resolution), through a restorative justice approach by applying diversion (Vide article 5 paragraph (1), (3) and article 7 paragraph (1) of the Juvenile Justice System Law). In addition, investigators when handling child criminal cases based on their judgment can take other actions while still considering the provisions of the laws and regulations and the police code of ethics. Second: The limitations in investigators have in terms of using their discretion have actually been implicitly given in the provisions of Article 18 paragraph (1) and (2) of the POLRI Law, which is based on the principle of public interest. In addition, investigators are also obliged to pay attention to the legal principles contained in the Juvenile Justice System Law and the professional code of ethics for the state police of the Republic of Indonesia.

Keywords : Investigators, Discretionary Limits, Children of Criminal Offenders